



MENTERI PPN / KEPALA BAPPENAS  
LEMBAR EDARAN

NO. AGENDA	TANGGAL SURAT	DITERIMA TANGGAL	TINGKAT SURAT
2728/SM/M.PPN/VI/2016	31-05-2016	01-06-2016	PENTING
Asal Surat : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas) Nomor : 0202/M.PPN/05/2016 Perihal : Usulan Hibah Australia Infrastructure Program 2017-2027			RINGKASAN ISI SURAT
DITERUSKAN KEPADA :		ARAHAN	Usulan Hibah Australia Infrastructure Program 2017-2027
<input checked="" type="checkbox"/> Sesmen PPN/Sestama Bappenas		1. Edarkan	
Inspektur Utama		2. Mohon dihadiri/diwakili	
		<input checked="" type="checkbox"/> 3. Bicarakan dengan saya	
		4. Dibahas bersama	
DEPUTI BIDANG:		5. Teliti dan tanggapi	
1. Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan		6. Siapkan draft/bahan	
2. Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan		7. Siapkan jawaban sesuai ketentuan	
3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan		8. Siapkan laporan/laporkan	
4. Ekonomi		9. Dapat disetujui	
5. Kemaritiman dan Sumber Daya Alam		10. Ditolak	
6. Sarana dan Prasarana		11. Perbaiki	
7. Pengembangan Regional		12. Untuk diselesaikan	
<input checked="" type="checkbox"/> 8. Pendanaan Pembangunan		13. Koordinasikan	
9. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan		14. Untuk diketahui	
10. Dampingi		15. Untuk menjadi perhatian	
SAMIEN BIDANG & STAF KHUSUS		16. Dijadwalkan	
1. Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan		17. Dampingi	
2. Hubungan Kelembagaan		<input checked="" type="checkbox"/> 18. Tindak lanjuti	
3. Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan		19. File	
4. Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur			
5. Pemerataan dan Kewilayahan			
6. Staf Khusus Menteri			
- Loso Judijanto			
- Danang Rizky Ginanjar			
7. Tim Asistensi			
PUSAT:			
1. Pembinaan Pendidikan & Pelatihan Perencanaan			
2. Data & Informasi Perencanaan Pembangunan			
LAINNYA:			
Sekretariat			



Catatan/Arahan:

- Agar pertemuan hibah lebih tepat sasaran.

- Bagaimana evaluasi hibah rekhe-nya?  
- " Rencana pemanfaatannya? Sofyan A. Djallil



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Nomor : 0202 /M.PPN/05/2016  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Usulan Hibah *Australia Infrastructure Program 2017-2027*

Jakarta, 31 Mei 2016

**Yth. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas**  
di Jakarta

Merujuk ketentuan pada PP No. 10 Tahun 2011. tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan rencana penerimaan bantuan Pemerintah Australia melalui program hibah *Australia Infrastructure Program 2017-2027*. Hibah ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cepat, berkelanjutan, dan inklusif, serta meningkatkan akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar guna mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi ekonomi perempuan, dengan fokus pada infrastruktur, transportasi, air minum, dan sanitasi.

Rencana hibah tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan *Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) Phase 2* yang telah berlangsung sejak tahun 2011 dan akan berakhir bulan Januari tahun 2017. Program hibah lanjutan direncanakan untuk terlaksana dalam dua tahap, dengan total nilai hibah sebesar A\$300 juta. Tahap pertama direncanakan pada periode tahun 2017-2022 dengan kebutuhan pendanaan sebesar A\$150 juta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mengajukan usulan hibah *Australia Infrastructure Program 2017-2027* untuk dapat dicantumkan dalam dokumen perencanaan kegiatan yang dibiayai oleh Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS,

SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/  
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS



Imron Bulkin

**Tembusan:**

1. Yth. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
2. Yth. Plh. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas

## DOKUMEN USULAN KEGIATAN (DUK)

### HIBAH

1. Judul Kegiatan : New Australian Infrastructure Program 2017-2027

2. Instansi Pengusul : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

3. Instansi Pelaksana:

- a. Kementerian teknis, antara lain: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan
- b. Pemerintah daerah

4. Latar Belakang:

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama dekade terakhir telah berkontribusi besar dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan manusia di Indonesia. Namun, investasi infrastruktur menurun tajam setelah krisis keuangan tahun 1997-1998 dan masih jauh di bawah tingkat yang diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yaitu 6-7 persen, serta untuk mengatasi tantangan urbanisasi. Permasalahan kurangnya investasi tersebut diperparah dengan aset infrastruktur yang tidak digunakan atau tidak dikelola secara optimal.

Hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan bisnis untuk memperluas dan meningkatkan daya saing mereka antara lain adalah:

- *Transportasi* - kecepatan perjalanan di jalan arteri utama adalah di antara yang terburuk di Asia Timur, dengan lamanya waktu perjalanan berkontribusi pada biaya logistik yang tinggi - sekitar 24 persen dari PDB;
- *Air minum* - 29,21 persen dari rumah tangga tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman;
- *Sanitasi* - 37,59 persen dari rumah tangga tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak yang mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi untuk keluarga;
- *Listrik* - banyak daerah terdampak dari pemadaman listrik karena beban-berlebih, sementara di Papua hanya 30 persen dari populasi mendapatkan akses listrik; dan
- *Akses Internet* - Indonesia hanya memiliki sekitar 1,2 koneksi fixed broadband per 100 orang dibandingkan dengan 8.4 in Malaysia and 5.0 in Vietnam.

Setelah menjabat pada akhir 2014, Pemerintahan Jokowi mulai meneruskan pembangunan infrastruktur pada masa SBY dan memposisikannya sebagai salah satu prioritas tertinggi. RPJMN 2015-19 memberikan perhatian besar pada infrastruktur sebagai hal yang utama, termasuk investasi pembangunan prioritas dan target ambisius yang harus dipenuhi.

Meskipun upaya perbaikan dari pemerintahan sebelumnya telah dilakukan, hasil yang dicapai saat ini masih kurang memuaskan karena kombinasi dari beberapa faktor. Peminatan investor swasta terhambat oleh permasalahan yang terkait dengan kualitas *project preparation*, ketidak-jelasan peraturan dan ketidak-kepastian hukum. Masih banyak proyek besar terhambat karena permasalahan pembebasan lahan. BUMN, saat ini telah diperkuat dengan suntikan modal dan terus mendominasi sektor-sektor utama seperti transportasi dan listrik, namun beberapa BUMN masih perlu meningkatkan kinerjanya.

5. Tujuan:

Mendukung pertumbuhan ekonomi yang cepat, berkelanjutan dan inklusif dan meningkatkan akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar untuk membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi ekonomi perempuan.

**6. Ruang Lingkup Kegiatan:**

Kegiatan ini akan berfokus pada penyediaan infrastruktur transportasi (antara lain: pengembangan jaringan jalan dan keselamatan jalan; pengembangan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebarangan (ASDP); pengembangan tol laut dan pelabuhan rakyat), air minum dan sanitasi. Lingkup kegiatan antara lain bantuan teknis yang mendukung reformasi kebijakan, serta dukungan persiapan kegiatan infrastruktur. Bantuan teknis (Technical Assistance) yang mencakup kajian, *pre-feasibility studies, feasibility studies, modelling studies, and investment plans*.

**7. Lokasi:**

Nasional

**8. Sumber Daya Yang Dibutuhkan:**

- a. Sumber Daya Manusia. Posisi Konsultan Pelaksana – akan ditentukan kemudian pada saat design telah selesai di Januari 2017.
- b. Dana/Biaya

**9. Hasil Yang Diharapkan:**

**A. Keluaran/Outputs:**

1. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan, manajemen dan pemeliharaan investasi infrastruktur
2. Ketersediaan manual berkualitas untuk pelaksanaan, manajemen dan pemeliharaan investasi infrastruktur yang dibiayai oleh Pemerintah dan atau dari pinjaman MDB (multilateral development banks)
3. Uji coba/pemodelan skema inovatif (seperti Skema Anuitas Berbasis Kinerja / *performance based annuity scheme*)
4. Penyediaan data berkualitas untuk *policy and regulatory framework*
5. Peningkatan kapasitas dari aparat Pemerintah Indonesia dalam pengembangan kebijakan (*policy and regulatory development*)
6. Studi Kelayakan
7. *Project preparation assistance*

**B.1. Hasil/Outcomes:**

1. Pemeliharaan, pengelolaan, dan implementasi proyek yang berkualitas tinggi oleh Pemerintah Indonesia
2. Kerangka regulasi dan kebijakan yang kondusif untuk pembangunan infrastruktur
3. Persiapan proyek yang berkualitas tinggi

**B.2. Instansi Lain yang Terkait dalam Pencapaian Hasil/Outcomes:**

- ☐ Ada, sebutkan : Kementerian Teknis, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dll.
- ☐ Tidak ada

**10. Rencana Pelaksanaan Kegiatan:**

- a. Durasi: 5 tahun
- b. Perkiraan Tahun Pertama Pelaksanaan: 2017
- c. Jadwal Pelaksanaan:

Uraian kegiatan	Tahun				
	I	II	III	IV	V
1. Komponen Design	X				
2. Komponen Implementasi Design	X	X	X	X	X

d. Alokasi Sumber Dana:

Uraian Kegiatan	Instansi Pelaksana	Pembiayaan (USD)				Ket.
		Pinjaman	Hibah	Dana Pendamping	Total	
1. Design	Facility Managing Contractor	0	Up to 1.000.000	0	Up to 1.000.000	Facility Managing Contractor akan melaksanakan proses Design di July-December 2016
2. Implementasi Design	Facility Managing Contractor	0	Up to 105.980.000	0	Up to 105.980.000	Facility Managing Contractor akan melaksanakan implementasi setelah IndII Phase-2 selesai di January 2017
<b>TOTAL</b>		0	Up to 106.980.000	0	Up to 106.980.000	

\*150.000.000 AUD

1 AUD = 0.7132 USD (rate on 3<sup>rd</sup> March 2016)

11. Manajemen Dan Organisasi Pelaksanaan Kegiatan:

Tatakelola, manajemen, kordinasi dan pengaturan pengawasan dalam melaksanakan kegiatan ini (seperti Komite Pengarah, Komite Teknis, dll) akan ditentukan kemudian setelah proses 'Design' selesai pada Januari 2017.

Penanggung Jawab Usulan

Wismana Adi Suryabrata  
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

# DAFTAR ISIAN PENGUSULAN KEGIATAN (DIPK)

## HIBAH

### I. UMUM

#### 1. Judul Kegiatan

Bahasa Indonesia:

Bahasa Inggris: New Australian Infrastructure Program 2017-2027

#### 2. Instansi Pengusul/Executing Agency (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris)

☐ Kementerian/Lembaga : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas/Ministry of National Development Planning or National Development Planning Agency  
mengusulkan kegiatan:

☒ dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga tersebut

☐ yang direncanakan untuk diteruskan kepada Pemda:

#### 3. Instansi Pelaksana/Implementing Agency (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris)

##### a. Kementerian teknis/ Line Ministries

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas (Ministry of National Development Planning/ National Development Planning Agency)
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ministry of Public Works and Housing)
- Kementerian Perhubungan (Ministry of Transportation)

##### b. Pemerintah daerah/ Local Government(s)

#### 4. Durasi Pelaksanaan : 5 tahun

#### 5. Perkiraan Tahun Pertama Pelaksanaan : 2017

### II. PEMBIAYAAN

#### 6. Nilai Pembiayaan

Instansi Pelaksana	Pembiayaan (USD)		Total Biaya (USD)
	Hibah	Pendanaan dalam negeri	
Kementerian PPN/Bappenas	106.980.000*	0	106.980.000
<b>TOTAL</b>	106.980.000	0	106.980.000

\*150.000.000 AUD

1 AUD = 0.7132 USD (rate on 3<sup>rd</sup> March 2016)

#### 7. Indikasi Sumber Pembiayaan

Apakah kegiatan ini sudah memiliki indikasi sumber pembiayaan?

☒ Ya, sebutkan : Australian Department of Foreign Affairs and Trade

\*Mohon dilampirkan salinan dokumen yang menunjukkan indikasi sumber pembiayaan untuk kegiatan hibah yang diusulkan (misal MoU, surat, dan lain-lain)

☐ Tidak

### III. JUSTIFIKASI

#### 8. Keterkaitan Dengan Dimensi Pembangunan dalam RPJMN 2015-2019

- ☐ Sasaran Makro
- ☐ Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat
- ☐ Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan
- ☐ Sasaran Dimensi Pemerataan
- ☐ Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah

#### 9. Latar Belakang Kegiatan /Project Background (Maksimal 250 Kata)

##### *Bahasa Indonesia :*

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama dekade terakhir telah berkontribusi besar dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan manusia di Indonesia. Namun, investasi infrastruktur menurun tajam setelah krisis keuangan tahun 1997-1998 dan masih jauh di bawah tingkat yang diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yaitu 6-7 persen, serta untuk mengatasi tantangan urbanisasi. Permasalahan kurangnya investasi tersebut diperparah dengan aset infrastruktur yang tidak digunakan atau tidak dikelola secara optimal.

Hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan bisnis untuk memperluas dan meningkatkan daya saing mereka antara lain adalah:

- *Transportasi* - kecepatan perjalanan di jalan arteri utama adalah di antara yang terburuk di Asia Timur, dengan lamanya waktu perjalanan berkontribusi pada biaya logistik yang tinggi - sekitar 24 persen dari PDB;
- *Air minum* - 29,21 persen dari rumah tangga tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman;
- *Sanitasi* - 37,59 persen dari rumah tangga tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak yang mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi untuk keluarga;
- *Listrik* - banyak daerah terdampak dari pemadaman listrik karena beban-berlebih, sementara di Papua hanya 30 persen dari populasi mendapatkan akses listrik; dan
- *Akses Internet* - Indonesia hanya memiliki sekitar 1,2 koneksi fixed broadband per 100 orang dibandingkan dengan 8.4 in Malaysia and 5.0 in Vietnam.

Setelah menjabat pada akhir 2014, Pemerintahan Jokowi mulai meneruskan pembangunan infrastruktur pada masa SBY dan memposisikannya sebagai salah satu prioritas tertinggi. RPJMN 2015-19 memberikan perhatian besar pada infrastruktur sebagai hal yang utama, termasuk investasi pembangunan prioritas dan target ambisius yang harus dipenuhi.

Meskipun upaya perbaikan dari pemerintahan sebelumnya telah dilakukan, hasil yang dicapai saat ini masih kurang memuaskan karena kombinasi dari beberapa faktor. Peminatan investor swasta terhambat oleh permasalahan yang terkait dengan kualitas *project preparation*, ketidak-jelasan peraturan dan ketidak-kepastian hukum. Masih banyak proyek besar terhambat karena permasalahan pembebasan lahan. BUMN, saat ini telah diperkuat dengan suntikan modal dan terus mendominasi sektor-sektor utama seperti transportasi dan listrik, namun beberapa BUMN masih perlu meningkatkan kinerjanya.

##### *Bahasa Inggris :*

Indonesia's rapid economic growth over the past decade has enabled impressive gains in human development and poverty reduction. However, infrastructure investment declined sharply following the 1997/1998 financial crisis and remains well below levels needed to sustain economic growth at 6-7 percent and address the challenges posed by continuing urbanisation. The problem of underinvestment is further exacerbated by existing infrastructure assets not being used or managed optimally.

The consequences in the difficulties faced by ordinary Indonesians and by businesses striving to expand and improve their competitiveness are not limited to:

- *Transport* - travel speeds on arterial roads are among the worst in East Asia, with longer journey times contributing to high logistics costs of around 24 per cent of GDP;
- *Water* - 18 per cent of the population lacks access to improved water, while 80 per cent lacks access to piped water;
- *Sanitation* - 98 per cent of the population lacks access to sewerage systems (including in the capital, Jakarta) resulting in severe economic costs to families;
- *Electricity* - many regions continue to suffer from load-shedding, while in Papua only 30 per cent of the population is connected; and
- *Internet access* - Indonesia has only around 1.2 fixed broadband connections per 100 persons as compared with 8.4 in Malaysia and 5.0 in Vietnam.

After taking office in late 2014, the Jokowi Government has continued the emphasis of the SBY Government on infrastructure development and positioned it as one of its highest priorities. The new Indonesian National Medium Term Development Plan (2015-19) devotes significant attention to infrastructure, outlining priority areas for investment and ambitious targets to be met.

Despite the efforts of the previous administration, results to date have fallen well short of projections due to a combination of factors. Private investor interest has been constrained by issues of project preparation quality, regulatory clarity and legal certainty. Major projects continue to suffer long delays due to land acquisition issues. SOEs, now strengthened with equity injections, continue to dominate the landscape in key sectors such as transport and power, however some continue to require improved performance.

#### 10. Ruang Lingkup Kegiatan/Scope of Work (Maksimal 250 Kata)

##### *Bahasa Indonesia :*

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cepat, berkelanjutan dan inklusif dan meningkatkan akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar untuk membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi ekonomi perempuan.

Kegiatan akan berfokus pada infrastruktur kelembagaan terutama dalam bidang **transportasi, air minum dan sanitasi** di mana Pemerintah Australia telah berperan dan telah memiliki hubungan yang kuat dengan Pemerintah Indonesia. Lingkup pekerjaan termasuk Bantuan Teknis/*Technical Assistance* (dengan porsi hibah infrastruktur) yang mencakup kajian, *pre-feasibility studies, feasibility studies, modelling studies, and investment plans*.

##### *Bahasa Inggris :*

The overall goal of this program is to support '*rapid, sustainable and inclusive economic growth and improved access to basic infrastructure services to help reduce poverty and promote women's economic participation and empowerment*'.

Assistance will focus on institutionally delivered infrastructure mainly in **transportation, drinking water, and sanitation** where existing programs and relationships between Australia and Indonesia are strongest. Scope of work consists of Technical Assistance (with a portion of infrastructure grants), which cover studies, *pre-feasibility studies, feasibility studies, modelling studies, and investment plans*.

#### 11. Sasaran Kegiatan



a. **Output dilengkapi dengan indikator output:**

Dalam Bahasa Indonesia :

- (a) Peningkatan kapasitas aparat pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan, manajemen dan pemeliharaan investasi infrastruktur
- (b) Ketersediaan manual berkualitas untuk pelaksanaan, manajemen dan pemeliharaan investasi infrastruktur yang dibiayai oleh Pemerintah dan atau dari pinjaman MDB (multilateral development banks)
- (c) Uji coba/pemodelan skema inovatif (seperti Skema Anuitas Berbasis Kinerja / *performance based annuity scheme*)
- (d) Penyediaan data berkualitas untuk policy and regulatory framework
- (e) Peningkatan kapasitas dari aparat Pemerintah Indonesia dalam pengembangan kebijakan (policy and regulatory development)
- (f) Studi Kelayakan
- (g) Project preparation assistance

Dalam Bahasa Inggris :

- (a) Increased capacity of Indonesian government officials in the delivery, management and maintenance of infrastructure investments
- (b) Availability of high quality manuals for the delivery, management and maintenance of infrastructure investments financed by Government or MDB loans
- (c) Trials / modelling of innovative scheme (e.g. PBAS)
- (d) Availability of evidence to inform policy and regulatory framework
- (e) Increased capacity of Indonesian government officials in policy and regulatory development
- (f) Feasibility studies
- (g) Project preparation assistance

b. **Outcomes:**

Dalam Bahasa Indonesia :

1. Pemeliharaan, pengelolaan, dan implementasi proyek yang berkualitas tinggi oleh Pemerintah Indonesia
2. Kerangka regulasi dan kebijakan yang kondusif untuk pembangunan infrastruktur
3. Persiapan proyek yang berkualitas tinggi

Dalam Bahasa Inggris :

1. High quality project delivery, management and maintenance by Government of Indonesia
2. An improved policy and regulatory framework conducive to Infrastructure development
3. High quality project preparation

**12. Keterkaitan Dengan Kegiatan Lain**

Judul Kegiatan	Sumber Dana	Tahun Pelaksanaan	Keterangan *)
1. Hibah air minum dan sanitasi	APBN	2016	Mainstreaming water and sanitation hibah AusAid melalui pendanaan APBN

2. Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)	APBD	2016	Pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui <i>output-based</i> project untuk pemeliharaan jalan provinsi
*) Penjelasan keterkaitan dengan kegiatan yang diusulkan			

#### IV. DOKUMENTASI YANG DILAMPIRKAN

<b>13. Persyaratan Umum</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumen Usulan Kegiatan (DUK) Hibah
<b>14. Persyaratan Khusus</b>
Untuk usulan kegiatan yang direncanakan untuk diterushibahkan kepada Pemda harus melampirkan:
<input type="checkbox"/> Surat Usulan Pemda calon penerima penerusan hibah

Penanggung Jawab Usulan

Wismana Adi Suryabrata  
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana